

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2021

RENCANA KERJA
KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Startegis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Renja Kecamatan Bancar Tahun 2021 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Kecamatan Bancar Tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2021. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Renja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Renja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian misi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, penyusunan Rancangan Renja, penyusunan Rancangan Akhir Renja dan Penetapan Renja. Mekanisme dan waktu penyusunan Renja bersinergi dengan penyusunan RKPD, karena pada dasarnya RKPD merupakan rangkuman dari Renja-Renja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan
 2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.
1. Tahap Perumusan Rancangan Renja OPD Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengolahan data dan informasi;
 - 2) Analisis gambaran pelayanan OPD;
 - 3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
 - 4) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
 - 5) Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
 - 6) Perumusan tujuan dan sasaran;
 - 7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - 8) Perumusan kegiatan prioritas;
 - 9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
 - 10) Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
 - 11) Pembahasan forum OPD; dan
 - 12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan

mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

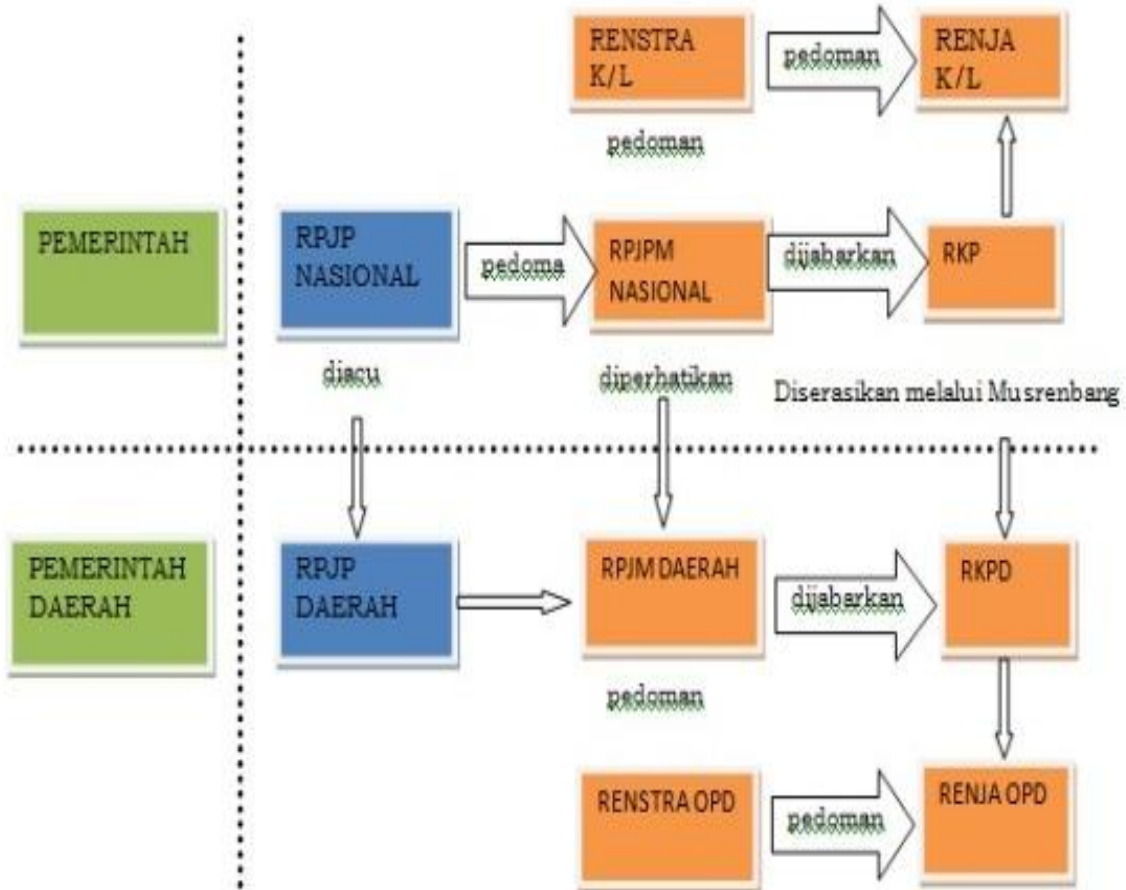
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Tahap Penyajian rancangan Renja OPD merupakan sistematika penyajian Rancangan Renja yang disiapkan dan ditetapkan untuk menguraikan perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat beserta pagu indikatifnya. Proses penyusunan Renja OPD pada tingkatan OPD secara garis besar meliputi:

- 1) OPD menyusun Renja-OPD.
- 2) Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- 3) Rancangan Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- 5) Rancangan Renja-OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan:

Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah



Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari hasil MUSRENBANG maka Menteri menyusun Rancangan Akhir RKP dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan

kedalam RPJM Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD dan seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA OPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh OPD harus menyusun RENSTRA OPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA OPD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA OPD untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA-OPD. Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan di internal OPD maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Kabupaten Tuban dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019-2021.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 66 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 tahun 2017 tentang Renstra Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
10. Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2020 telah menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2020 telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2021;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021;

3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Renja Kecamatan Bancar Tahun 2021 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IVPENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kantor Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran .

Mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban tahun lalu sampai tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini. Turunan Renja OPD Tahun 2020 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

| | Anggaran | Realisasi | % |
|--|---------------|---------------|--------|
| I. PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1.455.824,81 | 532.800,16 | 36,60 |
| 1. Hasil Retribusi Daerah | 1.432.000 | 477.000 | 33,31 |
| 2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 23.824,81 | 55.800,16 | 234,21 |
| II. BELANJA | 2.549.274.263 | 2.146.230.900 | 84,19 |
| 1. Belanja Tidak Langsung | 2.076.281.055 | 1.764.104.026 | 84,96 |
| 1.1. Gaji dan Tunjangan PNS | 1.651.220.772 | 1.396.305.642 | 84,56 |
| 1.2. Tambahan Penghasilan PNS | 424.988.683 | 367.798.384 | 86,54 |
| 2. Belanja Langsung | 472.993.208 | 382.126.874 | 80,79 |

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2019 terdiri atas Program dan kegiatan dengan realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-----------------|---|---|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG | | | | | | | | | |
| | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | |
| 4.09.4.09.03.09 | Program Peningkatan Kinerja Administarasi | Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 240 | 300 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah Tahun 2021) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | <i>Perkantoran</i> | <i>Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i> | | | | | | | | |
| 4.09.4.09.03.09.01 | Penyediaan Jasa Perkantoran | Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 7 | 21 | 300 |
| 4.09.4.09.03.09.02 | Penyediaan Peralatan Perkantoran | Jumlah Peralatan Perkantoran | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 15 | 300 |
| 4.09.4.09.03.09.03 | Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | 8 | 24 | 300 |
| 4.09.4.09.03.09.04 | Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Diadakan | 12 | - | - | - | - | 12 | - | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah Tahun 2021) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4.09.4.09.03.09.05 | Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 15 | 300 |
| 4.09.4.09.03.10 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase Aparatur OPD Mematuhi Peraturan Kedinasan (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 240 | 300 |
| 4.09.4.09.03.10.01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang Disediakan | 32 | 32 | 32 | 24 | 75 | 0 | 56 | 175 |
| 4.09.4.09.03.10.03 | Peningkatan Kompetensi Sumber Daya | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 300 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah Tahunn 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Aparatur | Kompetensi | | | | | | | | |
| 4.09.4.09.03.11 | Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP OPD | BB | | BB | B | B | BB | BB | BB |
| 4.09.4.09.03.11.01 | Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | 18 | 300 |
| 4.09.4.09.03.11.02 | Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan | Jumlah Dokumen dan Jumlah Jasa | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | 9 | 27 | 300 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah Tahun 2021) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan yang Disediakan | | | | | | | | |
| 4.09.4.09.03.49 | Program Pembinaan Kemasyarakatan | Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 |
| 4.09.4.09.03.49.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan | Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana | 48 | 48 | 48 | 48 | 100 | 48 | 144 | 300 |
| 4.09.4.09.03.49.02 | Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah | Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 300 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah Tahunn 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4.09.4.09.03.27 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa | Persentase Desa memiliki BUMDes (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 |
| 4.09.4.09.03.27.08 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa | Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa | 24 | 24 | 24 | 24 | 100 | 24 | 72 | 300 |
| 4.09.4.09.03.28 | Program Peningkatan | Persentase desa telah mengisi | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 240 | 300 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah Tahunn 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | <i>Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa</i> | <i>buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)</i> | | | | | | | | |
| | | <i>Persentase desa telah menetapkan peraturan tentang keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)</i> | 80 | | | | | | | |
| | | <i>Persentase desa dengan menggunakan keuangan desa sesuai dengan</i> | 80 | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah Tahunn 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | <i>ketentuan (%)</i> | | | | | | | | |
| 4.09.4.09.03.28.01 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah asistensi yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa | 24 | 24 | 24 | 24 | 100 | 24 | 72 | 300 |
| 4.09.4.09.03.28.02 | Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa | Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi bantuan keuangan alokasi dana desa | 24 | 24 | 24 | 24 | 100 | 24 | 72 | 300 |
| 4.09.4.09.03.31 | <i>Program Peningkatan Kualitas Perijinan</i> | <i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</i> | 100 | | 85 | 90.10 | 106 | 85 | 90.10 | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah Tahunn 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|--------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | <i>terhadap pelayanan perijinan di kecamatan (PATEN)</i> | | | | | | | | |
| 4.09.4.09.03.31.04 | Operasional Pelaksanaan Perijinan di tingkat Kecamatan | Jumlah jenis perijinan dikecamatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 9 | 300 |

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program peningkatankinerja administrasi perkantoran sangat baik. Titik Realisasi terendah adalah pada kegiatan pemeliharaan rutin sarana prasarana perkantoran yaitu sebesar 75,05%. Dan untuk realisasi Program Pembinaan Kemasyarakatan mencapai 33,50%. Sedang realisasi atau serapan anggaran pada program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sangat baik yaitu mencapai 91,15% dengan titik serapan tertinggi ada pada kegiatan Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yaitu sebesar 93,55%. Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 80,79%, Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa sebesar 66,49%, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa sebesar 66,49%, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan sebesar 86%, dan Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran yaitu sebesar 86,67%. Sedangkan Program Pembinaan Kemasyarakatan kegiatan yang tidak terserap adalah Pemantauan keamanan dan ketertiban wilayah sebesar 0%. Sedang untuk capaian kinerja /output yang dihasilkan dari masing-masing program bisa dilihat ditabel atas.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra 2016-2021, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2. :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

| No | indikator | SPM / Standart nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|-------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | Prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | |
| 2. | Nilai AKIP Kecamatan Bancar | - | - | CC | B | BB | A | B | B | BB | A | |
| 3. | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | - | - | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | Baik | Baik | |
| 4. | Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan | - | - | 3 | 24 | 24 | 24 | 3 | 21 | 24 | 24 | |

Pada pencapaian 4 indikator Kecamatan Bancar, pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik dokumen jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan pada tahun 2013. Untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Untuk menentukan perencanaan pembangunan tahun 2020 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2019 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Adapun hasil pencapaian tahun 2019 dan perkiraan pencapaian tahun 2021 akan diurutkan sesuai program.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bancar , menghadapi beberapa isu penting diantaranya sebagai berikut :

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel;
2. Tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa yang lebih baik;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa;
4. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan narkoba, gender, kenakalan remaja judi dll) yang belum optimal;
5. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2021 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bancar Tahun 2021 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2021 yang terdiri dari 7 program 16 kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2021.

Adapun table review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Bancar tahun 2021 dapat dilihat pada *TABEL 2.4*

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|--|-------------|--|-------------------------------|--------------------------|--|-------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp. 000) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) | |
| I | Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran | Kec. Bancar | Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 80% | 381.225 | Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran | Kec. Bancar | Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 80% | 381.225 | - |
| 1 | Penyediaan Jasa Perkantoran | Kec. Bancar | Jumlah jasa perkantoran yang tersedia | 7 jasa | 84.300 | Penyediaan Jasa Perkantoran | Kec. Bancar | Jumlah jasa perkantoran yang tersedia | 7 jasa | 84.300 | - |
| 2 | Penyediaan Peralatan Perkantoran | Kec. Bancar | Jumlah jenis peralatan perkantoran yang disediakan | 5 jenis peralatan perkantoran | 18.725 | Penyediaan Peralatan Perkantoran | Kec. Bancar | Jumlah jenis peralatan perkantoran yang disediakan | 5 jenis peralatan perkantoran | 18.725 | - |
| 3 | Pemeliharaan Rutin | Kec. Bancar | Jumlah jenis sarana dan | 8 unit | 276.200 | Pemeliharaan Rutin Sarana | Kec. Bancar | Jumlah jenis sarana | 8 unit | 276.200 | - |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|--|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|--|-------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------|
| | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKAT IF (Rp. 000) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) | |
| | Sarana dan Prasarana Perkantoran | | prasarana perkantoran yang terpelihara | | | dan Prasarana Perkantoran | | dan prasarana perkantoran yang terpelihara | | | |
| 4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Kec. Bancar | Jumlah sarana prasarana yang diadakan | | 0,00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Kec. Bancar | Jumlah sarana prasarana yang diadakan | | 0,00 | - |
| 5 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Luar kota tuban | Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan | 5 perjalanan dinas | 2.000 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Kec. Bancar | Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan | 5 perjalanan dinas | 2.000 | - |
| II | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kec. Bancar | Prosentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%) | 80% | 22.460 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kec. Bancar | Prosentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%) | 80% | 22.460 | - |
| 6 | Pengadaan Pakaian | Kec. Bancar | Jumlah pakaian dinas | 22 stel PDH, 1 stel PSH | 10.200 | Pengadaan Pakaian | Kec. Bancar | Jumlah pakaian | 22 stel PDH, | 10.200 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|-----|---|-------------|--|----------------------|---------------------------|---|-------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------|
| | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKAT IF (Rp. 000) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) | |
| | Dinas Beserta Perlengkapannya | | yang diadakan | | | Dinas Beserta Perlengkapannya | | dinas yang diadakan | 1 stel PSH | | |
| 7 | Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur | Kec. Bancar | Jumlah aparatur dalam peningkatan kompetensi | 16 PNS dan 6 Non PNS | 12.260 | Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur | Kec. Bancar | Jumlah aparatur dalam peningkatan kompetensi) | 16 PNS dan 6 Non PNS | 12.260 | |
| III | Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah | Kec. Bancar | Nilai AKIP SKPD | A | 135.314 | Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah | Kec. Bancar | Nilai AKIP SKPD | A | 135.314 | - |
| 8 | Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, | Kec. Bancar | Jumlah dokumen hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi | 6 dokumen | 19.780 | Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja | Kec. Bancar | Jumlah dokumen hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi | 6 dokumen | 19.780 | - |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|---|-------------|--|----------------|---------------------------|---|-------------|--|------------------|---------------------------|-----------------|
| | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKAT IF (Rp. 000) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGE T KINER JA | KEBUTU HAN DANA (Rp. 000) | |
| | pelaporan dan publikasi kinerja | | | | | | | | | | |
| 9 | Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah | Kec. Bancar | Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan perangkat daerah | 9 dokumen | 115.534 | Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah | Kec. Bancar | Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan perangkat daerah | 9 dokumen | 115.534 | - |
| IV | Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa | Kec. Bancar | Jumlah BUMDES | 100% | 9.000 | Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa | Kec. Bancar | Jumlah BUMDES | 100% | 9.000 | - |
| 10 | Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan | Kec. Bancar | Jumlah desa terfasilitasi penataan kelembagaan | 24 desa | 9.000 | Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan | Kec. Bancar | Jumlah desa terfasilitasi penataan | 24 desa | 9.000 | - |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|--|-------------|---|----------------|---------------------------|--|-------------|---|------------------|---------------------------|-----------------|
| | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKAT IF (Rp. 000) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGE T KINER JA | KEBUTU HAN DANA (Rp. 000) | |
| | an masyarakat desa | | masyarakat desa | | | masyarakat desa | | kelembagaa n masyarakat desa | | | |
| V | Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa | Kec. Bancar | Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%) | 80% | 33.000 | Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa | Kec. Bancar | Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%) | 80% | 33.000 | - |
| 11 | Asistensi pengelolaan keuangan desa | Kec. Bancar | Jumlah desa mendapatkan asistensi pengelolaan keuang desa | 24 desa | 24.000 | Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Kec. Bancar | Jumlah desa mendapatkan asistensi pengelolaan keuang desa | 24 desa | 24.000 | - |
| 12 | Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa | Kec. Bancar | Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan bantuan keuangan alokasi dana | 24 desa | 9.000 | Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa | Kec. Bancar | Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan bantuan keuangan | 24 desa | 9.000 | - |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|------|---|-------------|--|-------------------|---------------------------|---|-------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|
| | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKAT IF (Rp. 000) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) | |
| | | | desa | | | | | alokasi dana desa | | | |
| VI | Program Peningkatan Kualitas Perijinan | Kec. Bancar | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN) | 100% | 9.420 | Program Peningkatan Kualitas Perijinan | Kec. Bancar | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN) | 100% | 9.420 | - |
| 13 | Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan | Kec. Bancar | Jumlah perijinan/rekomendasi yang diterbitkan | 3 jenis perijinan | 9.420 | Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan | Kec. Bancar | Jumlah perijinan/rekomendasi yang diterbitkan | 3 jenis perijinan | 9.420 | - |
| VI I | Program Pembinaan Kemasyarakatan | Kec. Bancar | Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 158.000 | Program Pembinaan Kemasyarakatan | Kec. Bancar | Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 158.000 | |
| 14 | Kegiatan | Kec. | Jumlah | 48 kali | 49.000 | Kegiatan | Kec. | Jumlah | 48 kali | 49.000 | - |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|--|-------------|--|----------------|---------------------------|---|-------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKAT IF (Rp. 000) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) | |
| | Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan | Bancar | potensi/masalah masyarakat yang dikoordinasikan | | | Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan | Bancar | potensi/masalah masyarakat yang dikoordinasikan | | | |
| 15 | Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah | Kec. Bancar | Jumlah potensi/gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipantau | 12 kali | 9.000 | Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah | Kec. Bancar | Jumlah potensi/gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipantau | 12 kali | 9.000 | - |
| 16 | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah | Kec. Bancar | Jumlah dokumen laporan | 1 laporan | 100.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah | Kec. Bancar | Jumlah dokumen laporan | 1 laporan | 100.000 | |

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|--|-------------|---|----------------|---------------------------|--|-------------|---|------------------|---------------------------|-----------------|
| | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKAT IF (Rp. 000) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGE T KINER JA | KEBUTU HAN DANA (Rp. 000) | |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Kec. Bancar | Nilai AKIP Perangkat Daerah | A | 2.803.352 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Kec. Bancar | Nilai AKIP Perangkat Daerah | A | 2.803.352 | - |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Bancar | Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengendalian | 6 dokumen | 19.720 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Bancar | Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengendalian | 6 dokumen | 19.720 | - |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat | Kec. Bancar | Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan | 9 dokumen | 2.380.501 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Bancar | Jumlah dokumen hasil pengelolaan | 9 dokumen | 2.380.501 | - |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|---|-------------|--|----------------------|---------------------------|--|-------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------|
| | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKAT IF (Rp. 000) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) | |
| | Daerah | | perangkat daerah | | | | | keuangan perangkat daerah | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Kec. Bancar | Persentase Aparatur OPD mematuhi Peraturan kedinasan | 80% | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Kec. Bancar | Persentase Aparatur OPD mematuhi Peraturan kedinasan | 80% | | - |
| 3 | Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah | Kec. Bancar | Jumlah aparatur dalam peningkatan kompetensi | 16 PNS dan 6 Non PNS | 22.330 | Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah | Kec. Bancar | Jumlah aparatur dalam peningkatan kompetensi | 16 PNS dan 6 Non PNS | 22.330 | - |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Kec. Bancar | Angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 80 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ | Kec. Bancar | Angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 80 | | - |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|---|-------------|---|----------------|---------------------------|---|-------------|---|------------------|---------------------------|-----------------|
| | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKAT IF (Rp. 000) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGE T KINER JA | KEBUTU HAN DANA (Rp. 000) | |
| | / Kota | | | | | Kota | | | | | |
| 4 | Administra si Umum Perangkat Daerah | Kec. Bancar | Jumlah jasa administrasi perkantoran | 5 jenis | 20.517 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Bancar | Jumlah jasa administrasi perkantoran | 5 jenis | 20.517 | - |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Bancar | Jumlah jasa administrasi perkantoran | 7 jasa | 80.898 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Bancar | Jumlah jasa administrasi perkantoran | 7 jasa | 80.898 | |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Bancar | Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan | 8 unit | 279.384 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Bancar | Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan | 8 unit | 279.384 | |
| II | Program Penyelenggaraan | Kec. Bancar | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | B | 9.420 | Program Penyelenggaraan | Kec. Bancar | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | B | 9.420 | - |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|-----|---|-------------|---|----------------|---------------------------|---|-------------|---|----------------|--------------------------|-----------------|
| | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKAT IF (Rp. 000) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) | |
| | Pemerintah an Dan Pelayanan Publik | | (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN) | | | Pemerintah an Dan Pelayanan Publik | | (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN) | | | |
| 7 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Bancar | Jumlah perijinan/rekomendasi yang diterbitkan | 3 jenis | 9.420 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Bancar | Jumlah perijinan/rekomendasi yang diterbitkan | 3 jenis | 9.420 | - |
| III | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kec. Bancar | Persentase desa memiliki BUMDes | 100 % | 8.965 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kec. Bancar | Persentase desa memiliki BUMDes | 100 % | 8.965 | - |
| 8 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Bancar | Jumlah desa terfasilitasi penataan kelembagaan | 24 desa | 8.965 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Bancar | Jumlah desa terfasilitasi penataan | 24 desa | 8.965 | - |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|---|-------------|--|----------------|---------------------------|---|-------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKAT IF (Rp. 000) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) | |
| | | | masyarakat desa | | | | | kelembagaan masyarakat desa | | | |
| IV | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kec. Bancar | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 99.978 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kec. Bancar | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 99.978 | - |
| 9 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Bancar | Jumlah dokumen Laporan | 1 laporan | 99.978 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Bancar | Jumlah dokumen Laporan | 1 laporan | 99.978 | - |
| V | Program Pembinaan Dan Pengawasan | Kec. Bancar | Persentase desa telah mengisi buku administrasi | 100% | 90.746 | Program Pembinaan Dan Pengawasan | Kec. Bancar | Persentase desa telah mengisi buku | 100% | 90.746 | - |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|---|-------------|--|----------------|---------------------------|---|-------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKAT IF (Rp. 000) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) | |
| | n Pemerintahan Desa | | keuangan desa sesuai dengan ketentuan | | | Pemerintahan Desa | | administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan | | | |
| 10 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Bancar | Jumlah desa mendapatkan asistensi pengelolaan keuangan desa dan jumlah desa terfasilitasi pengelolaan bantuan keuangan ADD | 24 desa | 90.746 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Bancar | Jumlah desa mendapatkan asistensi pengelolaan keuangan desa dan jumlah desa terfasilitasi pengelolaan bantuan keuangan ADD | 24 desa | 90.746 | - |

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bancar akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja(Renja) Kecamatan Bancar Tahun 2021 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari

berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) dapat dilihat pada:
TABEL 2.5 :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|--|-------------|--|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Kec. Bancar | Nilai AKIP Perangkat Daerah | A | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Bancar | Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengendalian | 6 dokumen | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Bancar | Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan perangkat daerah | 9 dokumen | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Kec. Bancar | Persentase Aparatur OPD mematuhi Peraturan kedinasan | 80% | |
| 3 | Administrasi | Kec. | Jumlah aparatur | 16 PNS | |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|--|---------------|--|
| | Kepegawaian Perangkat Daerah | Bancar | dalam peningkatan kompetensi | dan 6 Non PNS | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Kec. Bancar | Angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 80 | |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Bancar | Jumlah jasa administrasi perkantoran | 5 jasa | |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Bancar | Jumlah jasa administrasi perkantoran | 7 jasa | |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Bancar | Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan | 8 unit | |
| II | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kec. Bancar | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN) | B | |
| 7 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Bancar | Jumlah perijinan/rekomendasi yang diterbitkan | 3 jenis | |
| III | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kec. Bancar | Persentase desa memiliki BUMDes | 100% | |
| 8 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Bancar | Jumlah desa terfasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa | 24 desa | |
| IV | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kec. Bancar | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | |
| 9 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kec. Bancar | Jumlah dokumen | 1 laporan | |

| | sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Laporan | | |
|----|---|-------------|--|---------|--|
| V | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Bancar | Persentase desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan | 100% | |
| 10 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Bancar | Jumlah desa mendapatkan asistensi pengelolaan keuangan desa dan jumlah desa terfasilitasi pengelolaan bantuan keuangan ADD | 24 desa | |
| | | | | | |

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Bancar telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bancar Tahun 2021. Rencana Kerja Kecamatan Bancar merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Millenium Development Goals (MDG's)*. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja OPD.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang

akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tuban dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategis goal*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indicator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Adapun tujuan strategis Pemerintah Kecamatan Bancar adalah :

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Sasaran dari tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan.
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan).

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut,

ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bancar dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatten /Kota
 - 1) Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - 1) Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN

| Kode | | | | Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana tahun 2022 | |
|------|----|----|----|--|--|--------------------|-------------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | Lokasi | Target capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 4 | 09 | | | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 50 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | Kec. Bancar | 80% | 381.225 | APBD | | 80% | 381.225 |
| 03 | 01 | 50 | 01 | Penyediaan Jasa Perkantoran | Jumlah jasa perkantoran yang tersedia | Kec. Bancar | 7 jasa | 84.300 | APBD | Tiap bulan | 7 jasa | 84.300 |
| 03 | 01 | 50 | 02 | Penyediaan Peralatan Perkantoran | Jumlah jenis peralatan perkantoran yang di sediakan | Kec. Bancar | 5 jenis peralatan perkantoran | 18.725 | APBD | Tiap bulan | 5 jenis peralatan perkantoran | 18.725 |

| Kode | | | | Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana tahun 2022 | |
|------|----|----|----|--|--|--------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | Lokasi | Target capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 03 | 01 | 50 | 03 | Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara | Kec. Bancar | 8 unit | 276.200 | APBD | Tiap bulan | 8 unit | 276.200 |
| 03 | 01 | 50 | 04 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah sarana prasarana yang diadakan | Kec. Bancar | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 01 | 50 | 12 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan | Kec. Bancar | 5 perjalanan dinas | 2.000 | APBD | Tiap bulan | 5 perjalanan dinas | 2.000 |
| 03 | 01 | 5 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%) | Kec. Bancar | 80% | 22.460 | APBD | | 80% | 22.460 |
| 03 | 01 | 5 | 16 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | Kec. Bancar | 22 stel PDH ,1 stel PSH | 10.200 | APBD | Tribulan III | 22 stel PDH ,1 stel PSH | 10.200 |

| Kode | | | | Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana tahun 2022 | |
|------|----|----|----|--|--|--------------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | Lokasi | Target capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 03 | 01 | 5 | 17 | Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur | Jumlah aparatur dalam peningkatan kompetensi | Kec. Bancar | 22 orang (16 PNS,6 Non PNS) | 12.260 | APBD | Tiap bulan | 22 orang (16 PNS,6 Non PNS) | 12.260 |
| 03 | 01 | 11 | | Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah | Nilai AKIP SKPD | Kec. Bancar | BB | 135.314 | APBD | | A | 135.314 |
| 03 | 01 | 11 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja | Jumlah dokumen hasil perencanaan,pengendalian dan evaluasi,pelaporan dan publikasi | Kec. Bancar | 6 dokumen | 19.780 | APBD | Tiap bulan | 6 dokumen | 19.780 |
| 03 | 01 | 11 | 2 | Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah | Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan perangkat daerah | Kec. Bancar | 9 dokumen | 115.534 | APBD | Tiap bulan | 9 dokumen | 115.534 |
| 03 | 01 | 27 | | Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa | Jumlah BUMDES | Kec. Bancar | 100% | 9.000 | APBD | | 100% | 9.000 |
| 03 | 01 | 27 | 10 | Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa | Jumlah desa terfasilitasi penataan kelembagaan | Kec. | 24 desa | 9.000 | APBD | Tiap bulan | 24 desa | 9.000 |

| Kode | | | | Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana tahun 2022 | |
|------|----|----|---|--|--|--------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | Lokasi | Target capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | masyarakat desa | Bancar | | | | | | |
| 03 | 01 | 36 | | Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa | Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%) | Kec. Bancar | 80% | 33.000 | APBD | | 80% | 33.000 |
| 03 | 01 | 36 | 1 | Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah desa mendapatkan asistensi pengelolaan keuang desa | Kec. Bancar | 24 desa | 24.000 | APBD | Tiap bulan | 24 desa | 24.000 |
| 03 | 01 | 36 | 4 | Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa | Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan bantuan keuangan alokasi dana desa | Kec. Bancar | 24 desa | 9.000 | APBD | Tiap bulan | 24 desa | 9.000 |
| 03 | 01 | 33 | | Program Peningkatan Kualitas Perijinan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di | Kec. Bancar | 100% | 9.420 | APBD | | 100% | 9.420 |

| Kode | Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana tahun 2022 | | |
|------|--|--|--|------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|--|---------|
| | | | Lokasi | Target capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | Kecamatan (PATEN) | | | | | | | | |
| 03 | 01 33 09 | Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan | Jumlah perijinan/rekomendasi yang diterbitkan | Kec. Bancar | 3 jenis perijinan | 9.420 | APBD | Tiap bulan | 3 jenis perijinan | 9.420 |
| 03 | 01 | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | | | | | | | | |
| 03 | 01 43 | Program Pembinaan Kemasyarakatan | Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | Kec. Bancar | 100% | 158.000 | APBD | | 100% | 158.000 |
| 03 | 01 43 1 | Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan | Jumlah potensi/masalahkemasyarakatan yang dikoordinasikan | Kec. Bancar | 48 kali | 49.000 | APBD | Tiap bulan | 48 kali | 49.000 |
| 03 | 01 43 2 | Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah | Jumlah potensi/gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipantau | Kec. Bancar | 12kali | 9.000 | APBD | Tiap bulan | 12kali | 9.000 |

TABEL 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN

| Kode | | | | Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana tahun 2022 | |
|------|----|----|------|--|--|--------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | Lokasi | Target capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7 | 7 | | | Urusan Kewilayahan | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Kec. Bancar | A | 2.803.352 | APBD | Tiap bulan | A | 2.803.352 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengendalian | Kec. Bancar | 6 dokumen | 19.720 | APBD | Tiap bulan | 6 dokumen | 19.720 |

| Kode | Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana tahun 2022 | |
|-----------------------|--|--|--------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Lokasi | Target capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 7 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan perangkat daerah | Kec. Bancar | 9 dokumen | 2.380.501 | APBD | Tiap bulan | 9 dokumen 2.380.501 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Aparatur OPD mematuhi Peraturan kedinasan | Kec. Bancar | 80% | | | | 80% | |

| Kode | | | | Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana tahun 2022 | |
|------|----|----|------|--|---|--------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | Lokasi | Target capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah aparatur dalam peningkatan kompetensi | Kec. Bancar | 16 PNS dan 6 Non PNS | 22.330 | APBD | Tiap bulan | 16 PNS dan 6 Non PNS | 22.330 |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Angka indek kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran | Kec. Bancar | 80 | | | | 80 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah jasa administrasi perkantoran | Kec. Bancar | 5 jenis | 20.517 | APBD | Tiap bulan | 5 jenis | 20.517 |

| Kode | | | | Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana tahun 2022 | |
|------|----|----|------|---|--|--------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | Lokasi | Target capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa administrasi perkantoran | Kec. Bancar | 7 jasa | 80.898 | APBD | Tiap bulan | 7 jasa | 80.898 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan | Kec. Bancar | 8 unit | 279.384 | APBD | Tiap bulan | 8 unit | 279.384 |
| 7 | 01 | 02 | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di | Kec. Bancar | B | 9.420 | APBD | | B | 9.420 |

| Kode | | | | Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana tahun 2022 | |
|------|----|----|------|--|--|--------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | Lokasi | Target capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | Pelayanan Publik | Kecamatan (PATEN) | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah perijinan/rekomendasi yang diterbitkan | Kec. Bancar | 3 jenis | 9.420 | APBD | Tiap bulan | 3 jenis | 9.420 |
| 7 | 01 | 03 | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase desa memiliki BUMDes | Kec. Bancar | 100% | 8.965 | APBD | Tiap bulan | 100% | 8.965 |

| Kode | | | | Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana tahun 2022 | |
|------|----|----|------|---|--|--------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | Lokasi | Target capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah desa terfasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa | Kec. Bancar | 24 desa | 8.965 | APBD | | 24 desa | 8.965 |
| 7 | 01 | 05 | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | Kec. Bancar | 100% | 99.978 | APBD | Tiap bulan | 100% | 99.978 |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah dokumen Laporan | Kec. Bancar | 1 laporan | 99.978 | APBD | Tiap bulan | 1 laporan | 99.978 |

BAB V
P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2021 yang pembahasannya dilaksanakan melalui MusyawarahPerencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Tahun 2021 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2021 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Tahun 2021;
3. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 pada Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;
4. Renja Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2021;
5. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA

